SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 69 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan pembentukan struktur organisasi dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 19 Tahun 2026 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Sekretariat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026;

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/makasar

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/makasar

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Penempatan Staf Dalam Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026;
7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 30 Tahun 2026 Tentang Penempatan Staf Dalam Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026;
8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 68 Tahun 2026 Tentang Penempatan Staf Dalam Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026;

Memerhatikan: Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/makasar

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2026.
KESATU	:	Menetapkan Perubahan Struktur Organisasi Sekretariat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026, dengan susunannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Adapun Bagan Struktur Organisasi Sekretariat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 7 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

MUH. SALEH THAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Marjni Abdullah

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/makasar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 69 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM STRUKTUR	STATUS PEGAWAI
1	2	3	4
1	Muh. Saleh Thahir	Sekretaris KPU Kota Makassar	PNS
2	Mustar Jaya	Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN	PNS
3	Junita Mading	Fungsional Pranata Pengelolaan Keuangan APBN	PNS
4	Agus Salim	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PNS
5	Wapiyah	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PNS
6	Nirmalasari Anwar	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PNS
7	Fatmawati	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PNS
8	Prisca Virgyanti Masago Pali	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PNS
9	Wahyuni	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PNS
10	Yuswita	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PNS

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/makasar

NO	NAMA	JABATAN DALAM STRUKTUR	STATUS PEGAWAI
1	2	3	4
11	Dian Mayasari	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PNS
12	Enni Lidiawati	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PNS
13	Ihsan Arifin	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPPK
14	Ihsan	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPPK
15	Manyingarri	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPPK
16	Muhammad Fadel	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPPK
17	Asdar Abo	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPPK
18	Ephifanius Rodong	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPPK
19	Baharuddin	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPNPN
20	Marini Abdullah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PNS
21	Megawati Azman	Staf Sub Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PNS
22	Firmansyah A. Malik	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PNS
23	Muh. Naufal Fausan	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PNS
24	Saskia Adhani. A	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PPPK
25	Arifin Abdi Akbar	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PNS
26	Aryastuti Arudji	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PNS
27	A. Niswan S. Atjo	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PNS
28	Muhammad Wijaya	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PNS
29	Asdiana Rahman	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PPPK
30	Rasyid Sanjani P	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PPPK

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/makasar

NO	NAMA	JABATAN DALAM STRUKTUR	STATUS PEGAWAI
1	2	3	4
31	Rachmat Rachim	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PNS
32	Nikolas	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PNS
33	Yulianti	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PNS
34	Nur Aina Masdy	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PNS
35	Nirmalasari Satriadi	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PNS
36	Nurwansyah Sabaruddin	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PPPK

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 7 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

MUH. SALEH THAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Marmi Abdullah

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/makasar

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 69 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KOTA MAKASSAR



Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 7 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

MUH. SALEH THAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Marini Abdullah

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/makasar